

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI 12 PONTIANAK KOTA

Oleh : Muhammad Firman Mauludy

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
fmauludy@rocketmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi Program BOS di Sekolah Dasar Negeri 12 Pontianak Kota baik dalam pengorganisasian, Interpretasi, Aplikasi serta kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dengan mefokuskan pada proses pengorganisasian, inteprestasi, dan aplikasi dalam proses implementasi program BOS. Adapun penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji tentang proses implementasi program BOS. Hasil dari penelitian dilapangan menunjukkan bahwa implementasi program BOS sudah berjalan dengan optimal serta sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dan terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti pihak orang tua murid, komite sekolah, dan departemen pendidikan baik daerah maupun pusat supaya pelaksanaan program BOS akan berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi program BOS, Pengorganisasian Implementasi BOS, Interpretasi Implementasi Program BOS, Aplikasi Implementasi Program BOS

Abstract

The writing of this article aims to describe how the implementation of BOS Program in Public Elementary School 12 Pontianak City, both within the organization, Interpretation, Application and constraints faced. This study included in the descriptive study with qualitative analyzes are focus on the process of organizing, interpretation, and applications in the process of implementation of the BOS program. The writing of this article aims to describe, analyze and assess the process of implementation of the BOS program. Results of research in the field show that the implementation of the BOS program is running optimally and in accordance with the rules and procedures have been established and continue to coordinate with related parties, such as the parents, school committees, and departments of education in both local and central so that the implementation of the BOS program will run properly.

Keywords: Implementation of the BOS, BOS Organizing Implementation, Interpretation Program Implementation BOS, BOS Program Application Implementation

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 dan sehubungan dengan penuntasan program wajib belajar sembilan tahun, pemerintah membuat kebijakan program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dengan salah satu programnya yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 pasal 1 ayat (1) mengatakan “Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai

petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap pendidikan yang bermutu. Sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui penurunan biaya operasional sekolah dan biaya peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar sudah dibiayai oleh pemerintah.

Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” serta pasal 11 ayat (1)

berbunyi bahwa : “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Program BOS mulai dilaksanakan efektif pada juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran 2005/2006. Lahir program BOS dilatar belakangi oleh adanya peningkatan harga BBM pada bulan maret (rata-rata 60%) dan oktober 108%) di tahun 2005.

Program BOS sangat berpotensi untuk memberikan dampak yang nyata jika dilihat dari besarnya dana yang diberikan ke sekolah. Namun dampak tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan program yang akan menentukan dampak langsung program terhadap penerimaan sekolah dan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah, serta biaya pendidikan yang ditanggung orang tua.

Seiring dengan berjalannya waktu, dalam pelaksanaannya program BOS ini juga tidak terlepas dari pengawasan maupun evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) BOS pusat maupun Satker BOS propinsi. Hal ini dilakukan terus guna mengkaji mengenai hambatan-hambatan umum yang dihadapi oleh sekolah. Selanjutnya khusus pada aspek pembiayaan operasional sekolah. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan biaya satuan atau operasional sekolah – sekolah yang mendapatkan program dana BOS yang cukup signifikan dan kurang sesuai lagi dengan jumlah dana yang diterima. Hal ini yang menjadi acuan dasar bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang, maka selanjutnya terhitung mulai bulan januari tahun 2009 terjadi penyusutan biaya satuan BOS. Berdasarkan PERMEN Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Bab I Pendahuluan bagian “Sasaran Program dan Besar Bantuan” mengemukakan besarnya biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun

Berdasarkan adanya perubahan tersebut, maka jumlah dana yang dikeluarkan pada program BOS meningkat sangat signifikan. Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan dari tahun – tahun sebelumnya merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD 1945. Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan.

Program BOS adalah bantuan di bidang pendidikan yang berbeda dengan program - program bantuan pendidikan sebelumnya seperti Bantuan Khusus Murid (BKM), jaring Pengaman Sosial dan sebagainya terutama dalam hal sistem penyaluran serta cakupan sasaran penerimanya. Jika program bantuan pendidikan sebelumnya langsung disalurkan ke siswa miskin secara langsung, maka pada program BOS dana bantuan tidak diberikan secara langsung kepada siswa akan tetapi diberikan dan dikelola oleh sekolah. Selain itu karena dana secara langsung di kelola oleh sekolah, maka sasaran dari program BOS ini juga mencakup keseluruhan siswa pada sekolah tersebut. Sehingga jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid yang terdaftar di masing – masing sekolah. Melalui BOS, peserta didik tingkat pendidikan dasar dan menengah dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah, biaya BOS yang secara langsung dikelola oleh sekolah merujuk pada buku petunjuk BOS. Mekanisme pelaksanaan dan penyaluran dana BOS, yang diberikan secara langsung kepada sekolah, diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 maupun UU Sisdiknas tahun 2003 serta diharapkan dapat meminimalkan praktek korupsi berupa pungli, penyuntatan beasiswa atau manipulasi dan ketidakakuratan siswa penerima beasiswa.

Masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : pertama, dalam aktifitas pengorganisasian program BOS masih menemukan kendala seperti sering terjadinya keterlambatan dana BOS yang ditransfer ke rekening sekolah., dimana dana BOS yang seharusnya sudah masuk ke rekening sekolah setiap tanggal 9-10 justru penyalurannya tidak sesuai sebagai contoh, pada data laporan penerimaan BOS tahun 2011 SDN 12 Pontianak Kota menyebutkan bahwa pada triwulan I tanggal transfernya jatuh pada tanggal 16 maret 2011, triwulan II tanggal 14 April 2011 dan Triwulan III pada tanggal 11 Mei 2011 dan hanya Triwulan IV saja transfer dana BOS tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 9 Desember. Padahal keterlambatan transfer seperti ini akan menimbulkan permasalahan sendiri, karena disisi lain biaya operasional sekolah harus terus berjalan

Kedua, dalam aktifitas interpretasi akibat pihak sekolah masih belum menjalankan tujuan dari program BOS yang telah diatur didalam petunjuk teknis pelaksanaan program BOS yaitu membebaskan biaya kebutuhan sekolah karena para orang tua masih mengeluhkan tindakan pihak sekolah yang tidak memberikan anggaran BOS untuk persediaan pakaian sekolah sehingga para orang tua siswa mau tidak mau harus mengeluarkan dana pribadi buat pakaian sekolah siswa.

Ketiga, dalam aktifitas aplikasi pihak sekolah memiliki peraturan khusus dalam proses penyaluran dana BOS kesetiap siswa-siswa di SDN 12 Pontianak kota dimana sekolah memberikan dana bantuan tambahan yang berasal dari dana BOS sendiri bagi siswa-siswa yang menurut sekolah tidak mampu, padahal dalam peraturan penyaluran dana BOS sendiri sebenarnya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui petunjuk teknis pelaksanaan program BOS dimana sudah dijelaskan bahwa dana BOS yang sudah ditetapkan kepada masing-masing siswa adalah sebesar Rp. 580.000,- per tahunnya

B. KAJIAN LITERATUR

secara mandiri ataupun melalui berbagai Implementasi kebijakan publik dapat dimulai apabila tujuan – tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program – program telah dimuat dan dana dialokasikan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Menurut Wahab (2001:102) untuk memperjelas persoalannya, proses Implementasi harus ditinjau menurut tahap-tahapnya yaitu dimulai adanya suatu output kebijaksanaan dari badan pelaksana lalu kebutuhan kelompok-kelompok, dampak nyata dan keputusan-keputusan tersebut dan terakhir system politik terhadap undang-undang yang dievaluasi

Dari pendapat Winarno menyatakan bahwa (2002:102) implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik individu maupun kelompok dalam sebuah pemerintahan ataupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Dimock, dalam Tachjan (2006:71) mengemukakan bahwa ada beberapa tindakan yang diambil dalam implementasi kebijakan yaitu tujuan yang ditentukan, kebijakan yang dirumuskan serta dianalisis, keputusan yang diambil, planning, penyusunan program, pengorganisasian, pergerakan manusia sebagai pelaksana kegiatan serta pengawasan

Menurut Moenir (2006:141-150) tindakan berupa akal dan pikiran yang ditunjukkan pada objek tertentu kemudian diikuti dengan perbuatan untuk mencari bentuk kepuasan dikarenakan tujuan yang tercapai

Dipertegasakan lagi oleh Nawar (2002:18) bahwa tindakan seseorang akan begitu dipengaruhi oleh faktor jasmani, rohani, lingkungan, pendidikan, pikiran yang matang, dan adanya suatu kebutuhan

Selanjutnya menurut Jones dalam Agustino (2006:296) ada 3 pilar dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu adanya

sebuah pengorganisasian dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu menetapkan kembali sumber daya, unit dan metode yang diwujudkan sesuai dengan sasaran kebijakan. Lalu adanya Interpretasi kebijakan yang lebih operasional sehingga dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh pelaku dan penerima kebijakan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Aplikasi kebijakan publik dimana adanya aktifitas penyediaan pelayanan secara rutin.

Merujuk pada pendapat Jones diatas maka bisa dipahami bahwa proses implementasi adalah merupakan suatu proses tindakan – tindakan sistematis yang diawali dengan pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

C. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskriptif yang terjadi pada implementasi program BOS di SDN 12 Pontianak Kota. Dengan menggunakan metode ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Untuk mendapatkan data dan informasi peneliti menggunakan teknik observasi, teknik dokumentasi dan teknik wawancara guna mendukung data lapangan yang didapat. Adapun subjek penelitian yang peneliti miliki guna sebagai landasan untuk mendapatkan informasi-informasi saat meneliti, yaitu sebagai berikut:

- Kepala sekolah SDN 12 Pontianak Kota
- Bendahara BOS SDN 12 Pontianak Kota
- Ketua Komite Sekolah
- Guru SDN 12 Pontianak Kota
- Orang murid yang bersekolah di SDN 12 Pontianak Kota

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- Wawancara, yaitu peneliti mengadakan wawancara atau Tanya jawab secara langsung melalui komunikasi dua arah dengan informan yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti, agar bias mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dari informan. Adapun alat bantu yang digunakan adalah alat tulis dan buku catatan.
- Dokumentasi, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, surat-surat dan bahan tulisan lainnya.
- Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan menggunakan panca

indra, selanjutnya peneliti mencatat, menganalisis dan menyimpulkan. Adapun alat bantu yang digunakan adalah check list.

Sesuai dengan tipe penelitian yang mendeskripsikan keadaan yang ada di lapangan, makna proses selanjutnya adalah dengan menyederhanakan dan merangkum data-data dan informasi yang terkumpul sehingga dapat dipahami, dipaparkan serta diinterpretasikan secara mendalam. Teknik analisa yang digunakan adalah menggunakan analisa model interaktif yang meliputi 3 komponen analisis, yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu dengan membuat catatan-catatan penting atau merangkum inti yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan-informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan BOS
- b. Penyajian data, yang menyajikan semua data informasi yang telah tersusun dalam bentuk catatan dan tulisan sesuai dengan hasil dari wawancara penulis dengan para informan-informan kunci mengenai pelaksanaan BOS.
- c. Verifikasi atau kesimpulan data, yaitu membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan dalam pelaksanaan program BOS di SDN 12 Pontianak Kota.

D. PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI 12 PONTIANAK KOTA

1. Organisasi (pengorganisasian) implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Adapun hasil wawancara kepada Bendahara BOS sekolah mengenai proses pengorganisasian pelaksanaan program BOS di SDN 12 Pontianak Kota, menyatakan bahwa:

“dalam proses pengorganisasian pelaksanaan BOS dimulai pada saat dana BOS yang telah dikirim ke rekening sekolah, rekening sekolah sendiri mengatas namakan kepala sekolah dan bendahar itu sendiri, setelah dana tersebut telah ditransfer maka pihak sekolah akan mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan siswa dan keperluan-keperluan sekolah yang sebelumnya dana tersebut diumumkan dipapan pengumuman dan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara BOS, dan ketua komite sekolah.”

Adapun pendapat orang tua siswa mengenai pelaksanaan BOS oleh pihak sekolah yang diambil dari hasil wawancara dengan penulis, yaitu:

“Menurut saya dalam pelaksanaan program BOS, pihak sekolah telah bekerja secara optimal.”

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 12 Pontianak Kota menurut Bendahara BOS yang menyatakan :

“pihak-pihak yang terlibat antara lain Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam hal ini para orang tua siswa yang ikut bersama-sama dalam pengawasan pelaksanaan program BOS di sekolah.”

Adapun peran Komite Sekolah dalam pelaksanaan program BOS menurut ketua Komite Sekolah SDN 12 Pontianak Kota, mengungkapkan :

“peran dan tugas komite sekolah dalam pelaksanaan BOS di SDN 12 Pontianak Kota yaitu komite sekolah harus mengetahui rancangan keuangan sekolah dengan ikut terlibat dalam berbagai rapat anggaran BOS, disamping itu komite sekolah memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui kegiatan sekolah yang menggunakan dana BOS serta mengawasi dan mengontrol tindakan sekolah.”

Lalu untuk peran dewan guru dalam pelaksanaan program BOS, menurut salah satu guru di SDN 12 Pontianak Kota, mengungkapkan :

“peran dewan guru dalam pelaksanaan BOS yaitu ikut menyusun anggaran dana BOS sekolah serta ikut serta dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan BOS di sekolah”

Dalam pelaksanaan program BOS pihak sekolah tentu saja menemukan kendala, adapun menurut bendahara BOS salah satu kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan program BOS dalam hasil wawancara dengan peneliti, beliau mengungkapkan :

“kendala yang biasa dihadapi oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan BOS salah satunya yaitu terkadang dana BOS selalu terlambat transfer ke rekening sekolah, sehingga pelaksanaan BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah sedikit terhambat karena banyaknya komponen-komponen sekolah yang segera dianggarkan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa masalah keterlambatan dana BOS ke rekening sekolah ini cukup mengganggu pihak sekolah dalam menjalankan program BOS. Adapun penyebab dari keterlambatan dana BOS ke rekening sekolah menurut Bendahara BOS, yaitu :

“penyebab keterlambatan transfer dana BOS ke rekening sekolah bisa disebabkan oleh dari pihak sekolah sendiri yang terlambat dalam mengirimkan data-data sekolah ke tim manajemen BOS kota/kabupaten, sehingga proses verifikasi data oleh tim manajemen BOS kota/kabupaten juga terhambat pengerjaannya.”

2. Interpretasi dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Inteprestasi dalam pelaksanaan program BOS di SDN 12 Pontianak Kota merupakan tindakan dimana pihak sekolah sebagai salah satu pelaksana program BOS bisa membaca dan memahami petunjuk teknis pelaksanaan prgram BOS.

Adapun pernyataan dari Kepala Sekolah mengenai pemahaman petunjuk teknis tentang pelaksanaan program BOS yang menyatakan :

“tentu saja dalam menjalankan program BOS pihak sekolah harus bisa mempelajari dan memahami pedoman dasar serta petunjuk teknis tentang penerapan pelaksanaan program BOS, jika tidak maka pelaksanaan BOS disekolah akan tidak berjalan optimal.”

Dalam pelaksanaan program BOS ada tujuan dasar yang harus dicapai oleh pihak sekolah, menurut Bendahara BOS mengenai tujuan program BOS menyatakan :

“pihak sekolah dalam pelaksanaan program BOS selalu menindaklanjuti tujuan dari program BOS yang telah di amanatkan oleh pemerintah yaitu dengan meringankan beban masyarakat dengan membebaskan segala iuran dan pungutan sekolah.”

Dari pernyataan Bendahara BOS diatas maka penulis mencoba mengklarifikasi kepada para orang tua siswa apakah pernah pihak sekolah meminta iuran atau pungutan kepada orang tua siswa, berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu orang tua siswa yang menyatakan:

“Setahu saya pihak sekolah tidak pernah meminta iuran dalam bentuk apapun”

Dari pernyataan para orang tua siswa diatas dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan tujuan program BOS dengan baik terbukti dari pengakuan para orang tua siswa yang menyatakan tidak ada tindakan penarikan pungutan atau iuran dari pihak sekolah. Akan tetapi jika suatu saat ada penyelewengan dari pihak sekolah maka orang tua siswa berhak mengajukan masalah tersebut.

Akan tetapi pihak orang tua sangat mengeluhkan anggaran buat persediaan pakaian sekolah yang tidak diberikan oleh sekolah, berikut pernyataan salah satu orang tua:

“saya sangat kesulitan buat membeli pakaian sekolah karena sekolah tidak menyediakan”

Mengenai pernyataan diatas penulis coba meminta klarifikasi dari pihak sekolah, dimana kepala sekolah menyatakan bahwa:

“untuk anggaran persediaan pakain sekolah memang tidak disediakan oleh pihak sekolah karena itu sudah dari juknisnya yang tidak mencantumkan pakaian sekolah sebagai salah satu komponen pembiayaan dana BOS yang telah ditentukan oleh pusat”

3. Aplikasi dalam penerapan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam aplikasi penerapan program BOS mengacu pada proses pelayanan, pembiayaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan program BOS. Pada proses pelayanannya Kepala Sekolah memberikan tanggapan dalam wawancaranya yang menyatakan :

“ada beberapa bentuk pelayanan BOS yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa-siswi di SDN 12 pontianak kota, seperti pembebasan biaya ulangan umum kepada seluruh siswa, pemberian dana tambahan bagi siswa yang kurang mampu dan itu sudah tercantum dalam tujuan pelaksanaan BOS didala petunjuk teknis pelaksanaan BOS yaitu dengan membebaskan pungutan dalam bentuk apapun termasuk biaya ulangan umum,serta memberikan kelancaran dalam proses belajar bagi para murid yang tidak mampu sesuai dengan program standar kompetisi kelulusan.”

Pada peryataan diatas ada salah satu pelayanan BOS yang diberikan oleh sekolah adalah dengan membebaskan biaya ulangan umum bagi seluruh siswa, bagi penulis hal ini perlu adanya konfirmasi lagi kepada para orang tua siswa dalam wawancarnya mereka menyatakan :

“Pihak sekolah tidak pernah meminta uang ulangan umum karena sudah ditanggung oleh dana BOS”

Disamping itu pihak sekolah juga memberikan dana tambahan bagi siswa yang tidak mampu, padahal dalam peraturan BOS setiap anak sudah mendapatkan jatah anggaran masing-masing. Mengenai hal tersebut bendahara BOS menyatakan bahwa :

“dana tambahan tersebut juga merupakan bagian dari komponen pembiayaan dana BOS yang telah ditentukan oleh pusat dimana dana tambahan tersebut berasal dari sisa dana BOS , maksudnya jika seluruh komponen pembiayaan dana BOS sudah terpenuhi pendanaannya tetapi masih menyisahkan sisa maka dana tersebut kita manfaatkan untuk dana tambahan bagi siswa yang kurang mampu”

Lalu tentang pemberian dana bantuan tambahan kepada siswa yang kurang mampu, para orang tua siswa juga memberikan tanggapannya :

“Menurut saya bagus karena sekolah mau memikirkan kesejahteraan siswanya sendiri.”

Pada pernyataan para orang tua siswa diatas telah membuktikan bahwa pihak sekolah telah memberikan pelayanan program BOS dengan baik tanpa ada pelanggaran-pelaanggaran peraturan yang telah ditetapkan.

Tetapi terkadang ada sebagian dari orang tua siswa yang menyalahgunakan dana tersebut

untuk kepentingan lain. Hal tersebut dibenarkan oleh bendahara BOS yang menyatakan:

“terkadang dana tambahan yang diberikan oleh sekolah disalah gunakan oleh oknum orang tua misalnya yang dana tersebut dipakai buat membeli tas anak malah dipakai untuk keperluan pribadi seperti beli rokok, beli sembako, dan lain-lain”

Pada proses pembiayaan dana dari program BOS menurut Kepala Sekolah menyatakan :

“pada proses pembiayaan dana BOS yang telah diterima oleh pihak sekolah digunakan sesuai dengan RKAS yang telah ditentukan.”

Setelah pembiayaan oleh sekolah telah selesai maka adanya tindakan pelaporan pelaksanaan program dana BOS, dalam pelaporan pelaksanaan program BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah menurut Bendahara BOS menyatakan :

“pelaporan yang musti dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan melaporkan pencatatan keuangan BOS ke manajemen BOS Kabupaten/Kota setiap triwulan dengan lampiran Formulir BOS-K7 realisasi penggunaan.”

E. PENUTUP

Kegiatan Organisasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 12 Pontianak Kota sudah berjalan sesuai dengan Juknis pelaksanaan BOS tetapi masih ada terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti dana yang selalu terlambat di transfer dari pusat ke rekening sekolah. Mengenai keterlambatan transfer dana BOS ke rekening sekolah, sebaiknya sekolah harus selalu melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mencari tahu penyebab keterlambatan tersebut, dan juga sekolah bisa memanfaatkan sumber dana pribadi yang mereka punya melalui dana kas koperasi yang mereka miliki untuk dijadikan dana cadangan untuk mengantisipasi masalah keterlambatan transfer dana tersebut.

Pada kegiatan interpretasi pihak sekolah sudah menjalankan pelaksanaan program BOS sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan BOS yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi pihak sekolah masih belum bisa memberikan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada para

orang tua siswa mengenai pelaksanaan BOS sehingga para orang tua siswa ada yang belum mengerti bahkan mengeluh tentang biaya anggaran pakaian sekolah yang tidak diberikan padahal dalam juknis komponen pakaian sekolah memang tidak dianggarkan oleh pusat. Mengenai hal tersebut seharusnya pihak sekolah harus terus memberikan sosialisasi rutin dan lebih jelas serta transparan lagi mengenai program BOS sehingga para orang tua tersebut bias mengerti dan paham kegunaan dari program BOS.

Pada kegiatan Aplikasi rupanya pihak sekolah telah membuat pelaksanaan program tambahan dalam kegiatan BOS yaitu program pemberian biaya tambahan sekolah bagi murid-murid yang tidak mampu, dimana dana yang dipakai buat biaya tambahan tersebut adalah dari dana BOS, padahal pada Juknis pelaksanaan BOS data komponen pengeluaran yang telah diatur oleh pemerintah pusat tidak ada menyinggung tentang pemberian biaya tambahan sekolah bagi murid-murid yang tidak mampu, tetapi pihak sekolah bahwa dana BOS yang dipakai adalah sisa dana pengeluaran yang sesuai Juknis pelaksanaan BOS menyebutkan bahwa jika ada dana BOS yang tersisa dari seluruh dana BOS yang telah dikeluarkan maka sepenuhnya akan menjadi milik sekolah. Mengenai tindakan orang tua murid yang tidak memanfaatkan dana bantuan sebagaimana mestinya, maka sebaiknya pihak sekolah harus memberikan pengertian lebih kepada orang tua murid tersebut mengenai kegunaan dana bantuan tersebut bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan sekolah anaknya sendiri, supaya anaknya tersebut bisa bersekolah dengan layak. Jika para orang tua masih juga melakukannya maka lebih baik pihak sekolah memberikan bantuan tersebut tidak dalam bentuk uang tunai melainkan barang sesuai dengan keperluan murid tersebut.

F. REFERENSI

- Agustino, Leo, 2006, *Dasar – dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabetha, Bandung.
- Moenir, H. A. S. 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tachjan, H. 2006, *Kebijakan Publik. Cetakan I*, Puslit KP2W Unpad, Bandung.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Persada, Yogyakarta